

## **PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEMPERERAT KESERASIAN SOSIAL YANG MENDUKUNG INTEGRASI MASYARAKAT**

(Studi Komparatif Resolusi Konflik Sosial di Kabupaten Subang- Jawa Barat dan Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat)

*Tukino, Diana Harding \**

Tukino, dkk (2010), Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempererat Keserasian Sosial yang Mendukung Integrasi Masyarakat, *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2010, hal 76-84, 1 gambar.

### **Abstract**

*The objective of this research is to obtain a real description of social harmony that supports social integration in Sub-district of Subang, Province of West Java and Sub-district of Sambas, Province of West Kalimantan. Communities in these sub-districts have experienced social conflict nuanced SARA (ethnic, religion, racial, inter-group) in the form of violence actions and disputes among the communities. Social conflict gives wide impacts on social disaster. This research gives a benefit on developing a model of community development in creating social harmony that supports integration process in the community.*

*This research uses a qualitative method and applies phenomenology approach. Data collection is conducted by some techniques, i.e. in-depth interviews, observation and focus group discussion (FGD). Meanwhile research informants come from community leaders, both formal and non formal.*

*The result of the research indicates that social security based on social harmony of the community in Pamanukan, Sub-district of Subang, Province of West Java and the community in Sambas, West Kalimantan is weak. The model of community development as an effort to prevent re-occurrence of social conflicts that lead to social disaster can be either "Increasing Awareness of Peace" (Peace Awareness Raising).*

**Key Words:** *social conflict, community development, social capital, peace awareness raising*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Subang Jawa Barat pada tahun 1997 dan konflik sosial di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tahun 1999, memiliki kemiripan dari latar belakang terjadinya konflik sosial,

yakni konflik bernuansa SARA dalam bentuk tindakan kekerasan dan perselisihan antar kelompok masyarakat, meskipun dalam skala yang berbeda. Fenomena konflik sosial ini menarik untuk dikaji, terutama menelusuri nilai-nilai keserasian sosial yang mendukung integrasi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses, metode dan program yang bertujuan membangun kemampuan masyarakat untuk lebih memiliki ketahanan sosial yang memadai dan mampu menangkal berbagai ancaman dalam kehidupan keseharian

\* Penulis adalah staf pengajar pada STKS Bandung dan aktif di Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi (Puskasi).

masyarakat, yang pada gilirannya masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai tanpa konflik yang meluas. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti mempelajari kehidupan sosial psikologis pada masyarakat di lokasi penelitian, sekaligus menemukan model pemberdayaan masyarakat guna lebih melekatkan keserasian sosial antar komunitas.

## 1.2. Permasalahan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang dirumuskan yaitu “Bagaimanakah nilai-nilai keserasian sosial yang berlangsung pada masyarakat di Kabupaten Subang Jawa Barat dan masyarakat di Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat dalam mewujudkan integrasi masyarakat?”

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi yang nyata tentang keserasian sosial yang mendukung integrasi masyarakat di Kabupaten Subang-Jawa Barat dan masyarakat di Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat.

## 1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mempertahankan keserasian sosial yang mendukung integrasi masyarakat.

2. Menghasilkan model pemberdayaan masyarakat dalam keserasian sosial yang mendukung integrasi masyarakat.

## 2. TELAAH PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan tentang Konflik Sosial

Ritzer (1992) menjelaskan bahwa ide pokok dalam teori konflik pada intinya dapat terbagi menjadi tiga pikiran besar : Pertama, bahwa masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan terus- menerus di antara unsur-unsurnya. Kedua, setiap elemen akan

memberikan sumbangan pada disintegrasi sosial. Ketiga, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

Sedangkan teori struktural yang ditentang oleh teori konflik mengandung pula tiga pemikiran utama : *Pertama*, bahwa masyarakat berada pada kondisi statis, atau tepatnya berada pada kondisi keseimbangan. *Kedua*, setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas. *Ketiga*, anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum.

Kompetisi untuk mendapatkan akses pada sumberdaya yang langka menimbulkan sikap-sikap prajudis. Kumulatif sikap-sikap prajudis ini akan berkembang menjadi konflik terbuka bila ada peristiwa pemicu (*trigger*). Misalnya seperti yang dikemukakan oleh Aronson dalam *DuBois dan Miley* (1992) kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan, terutama ketika pekerjaan langka sering menimbulkan sikap-sikap negatif dan konflik. Dalam hal ini, berlaku pula teori the scarcity of resources, bahwa ketika sumberdaya langka maka semua orang akan berjuang untuk dapat mempertahankan hidup (*struggle for life*) dan akhirnya kelompok-kelompok masyarakat yang kuat yang menang (*the survival of the fittest*). Fenomena ini akan berlanjut terus terutama bila kelompok-kelompok dominan dapat mengabadikan status quo, dan konflik akan terus terjadi.

Sementara itu, *Smelser* dalam *Wiroto* (2004) menyatakan bahwa konflik merupakan gerakan sosial yang destruktif. Munculnya gerakan sosial semacam ini memiliki enam kondisi yang saling terkait, yaitu:

1. *Structural conduciveness*, yaitu suatu kondisi sosial yang memudahkan terjadinya konflik di suatu masyarakat. Struktur masyarakat yang kondusif untuk terjadinya konflik, misalnya adanya dua kelompok atau komunitas yang seimbang jumlahnya, tetapi tersegregasi baik secara sosial, budaya, ekonomi, pengelompokan pemukiman, dan lain-lain.

2. *Structural strain*, yaitu adanya “ketegangan sosial” yang ditandai oleh adanya ketidakpuasan dalam berbagai aspek kehidupan, adanya kecemburuan sosial, adanya ketidakpastian masa depan secara ekonomi dan politik dari sebagian besar anggota masyarakat.
3. *The spread of generaliezed beliefs*, yaitu menyebarnya suatu keyakinan atau kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa penyebab konflik adalah faktor yang bersifat ideologis.
4. *Precipitating atau triggering factors*, yaitu faktor yang meledakkan konflik tersembunyi menjadi konflik terbuka atau sering disebut sebagai faktor pemicu.
5. *Mobilization for action*, yaitu adanya suatu upaya yang sistematis untuk menggerakkan masyarakat untuk berkonflik atau dengan kata lain adanya penggalangan kekuatan dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
6. *Operation of social control*, yaitu bahwa konflik ini berkembang atau tidak, tergantung dari kontrol sosial di dalam masyarakat tersebut. Bila mekanisme ini berjalan baik, konflik akan dapat diredam dengan cepat. Bila sebaliknya konflik akan berkembang terus.

Kerangka model *Smelser* ini dapat memudahkan untuk memetakan konflik dalam suatu kerangka yang lebih jelas dan mendasar.

## 2.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemberdayaan, merupakan suatu program penanggulangan bencana yang sangat penting, akan tetapi tahapan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang terpadu dalam tahapan pra bencana menjadi tahapan penting yang pada dekade belakangan ini menjadi fokus perhatian utama (World Conference on Disaster Reduction / WCDR, 2005) serta Hyogo Framework for Action : “The systematic incorporation of risk reduction approaches into the implementation of emergency preparedness, response and recovery

in the reconstruction of affected communities”

Shaw, Gupta, dan Sharma (dalam Aribowo : 2008) menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat dalam kerangka penanggulangan bencana diberi penekanan pada suatu upaya pembangunan yang berkelanjutan, bukan sekadar diarahkan pada upaya kesiapsiagaan sesaat yang hanya dilakukan pada saat terjadi ancaman bencana (Nakagawa and Shaw, 2004). Pendapat ini sejalan dengan apa yang ditampilkan dalam Hyogo Framework for Action (HFA) : “The integration of disaster risk reduction into sustainable development policies and planning”. Pengembangan masyarakat berkelanjutan yang terintegrasi ini membutuhkan suatu pembiasaan secara terus menerus agar menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Pembiasaan ini membutuhkan suatu perubahan pula dalam nilai dan sikap masyarakat terhadap semua aktivitas sosial, ekonomi, serta manajemen lingkungan secara baik. economic activities and environmental management.

## 2.3. Modal Sosial sebagai bentuk Keserasian Sosial

Konsep modal sosial (*social capital*) menyangkut dua dimensi, yaitu *social glue* dan *social bridge* (Lang and Hornburg dalam Marliyantoro, 2002). Kerekatan sosial, disamping berisi kepercayaan sosial juga mencakup kesediaan atau keikhlasan berpartisipasi (*willingness to participate*). Sedangkan jembatan sosial tidak sekadar diartikan jalinan antar kelompok, tetapi juga keterbukaan akses bagi seluruh anggota masyarakat untuk berhubungan dengan sumberdaya diluar sirkel mereka (Marliyantoro, 2002). Modal sosial sebagai kenyataan yang dimiliki warga berupa kehendak baik, simpati, persahabatan, hubungan antar individu dan antar keluarga yang dapat mengatasi persoalan warga masyarakat. Senada dengan itu, *Grootaert* menilai bahwa modal sosial dimaknai sebagai kemampuan seseorang

untuk memanfaatkan berbagai keunggulan jaringan sosial atau struktur sosial di mana ia menjadi anggotanya. Dengan demikian, jika seseorang mengalami persoalan dan tidak mampu mengatasinya sendiri, maka akan dibantu warga lainnya secara sukarela.

Modal sosial juga sebagai sistem yang mengacu kepada atau hasil dari organisasi sosial dan ekonomi seperti pandangan umum (*world-view*), kepercayaan (*trust*), pertukaran timbal balik (*reciprocity*), pertukaran ekonomi dan informasi (*informational and economic exchange*), kelompok-kelompok formal dan informal (*formal and informal groups*), serta asosiasi-asosiasi yang melengkapi modal-modal lainnya (fisik, manusiawi, budaya) sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan (Tonny dan Utomo, 2004). Dari pengertian tersebut, menunjukkan bahwa modal sosial dapat dilihat hasil dari organisasi sosial dan ekonomi yang dapat terwujud dengan pengembangan kapasitas kelembagaan atau institusi maupun kapasitas sumber daya manusia.

## 2.4. Integrasi Masyarakat

Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk (multietnik) selalu menimbulkan persoalan integrasi nasional. Pluralitas masyarakat yang bersifat multidimensional itu akan dan telah menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horisontal, sementara stratifikasi sosial sebagaimana yang terwujud dalam masyarakat Indonesia akan memberi bentuk integrasi yang bersifat vertikal.

Suatu pengembangan konseptual tentang konsep masyarakat dikemukakan oleh *Robhuska* dan *Shepsle* yang menyatakan bahwa masyarakat majemuk dapat diidentifikasi melalui; 1) Keragaman budaya, 2) Komunitas kultural yang terorganisasi secara politik, dan 3) Alienasi etnik. Oleh karena setiap masyarakat memiliki keragaman kultural, maka dua ciri yang terakhir (politik etnik) inilah yang membedakan

antara masyarakat pluralistik (*pluralistic society*) dengan masyarakat majemuk (*plural society*). Oleh karena konfigurasi strukturalnya, masyarakat majemuk memiliki dua kecenderungan, 1). Inklinasi berkembangnya perilaku konflik di antara berbagai kelompok etnik, dan 2). Kecenderungan hadirnya (*force*) sebagai kekuatan integratif utama yang mengintegrasikan masyarakat.

Terlepas dari pendekatan konsep mana yang digunakan, tapi secara substansi semua konsep yang menjelaskan tentang heterogenitas (kemajemukan) ataupun masyarakat yang plural, pada hakikatnya tidak jauh berbeda (*congruent*). Pada satu sisi kemajemukan menyimpan kekayaan budaya dan khasanah tentang kehidupan bersama yang harmonis, jika integrasi berjalan dengan baik (menurut aksioma; *structural fungsionalism approach*). Tetapi pada sisi lain, kemajemukan selalu menyimpan dan menyebabkan terjadinya konflik antar etnik, baik yang bersifat latency maupun yang manifest (dalam aksioma, *conflict approach*) yang disebabkan oleh etnosentrisme, primordialisme, dan kesenjangan sosial.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti mengkaji persoalan yang muncul dari dan dalam masyarakat berkaitan dengan keserasian sosial (bukan dari sudut pandang peneliti) dan berupaya menemukan alternatif pemecahan yang dapat diterapkan dalam masyarakat tersebut, sebagai perubahan-perubahan yang sangat mungkin terjadi dalam mempererat keserasian sosial antar warga masyarakat yang mendukung integrasi bangsa.

### 3.2. Subjek Penelitian (Informan)

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat pada wilayah

yang pernah mengalami konflik sosial, yaitu masyarakat disekitar Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang provinsi Jawa Barat, dan masyarakat di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas provinsi Kalimantan Barat, meliputi; kepala desa, warga masyarakat yang diakui ketokohnya oleh warga setempat, tokoh wanita dan pemuda, serta organisasi lokal yang relevan dalam penanganan masalah konflik sosial.

Penetapan informan sebagai subjek penelitian menggunakan teknik snow-balling. Adapun jumlah informan penelitian pada lokasi penelitian di Subang sebanyak 8 (delapan) informan, sementara di Sambas sebanyak 9 (sembilan) orang informan.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Wawancara mendalam, observasi dan *focus group discussion*.

### **3.4. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, maka analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif. Dalam hal ini analisis penelitian sudah dimulai ketika peneliti memperoleh data di lapangan, dan dilakukan secara simultan selama penelitian berlangsung.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Gambaran Konflik Sosial di Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang**

Kerusuhan sosial bernuansa RAS yang terjadi tahun 1997 di Desa Mulyasari dan meluas ke desa-desa lainnya di sekitar Kecamatan Pamanukan. Kerusuhan tersebut merupakan akumulasi dari ketidakpuasan masyarakat (penduduk asli Desa Mulyasar–Pamanukan) terhadap WNI Tionghoa yang mendominasi kegiatan ekonomi. Kerusuhan diawali dengan

terjadinya perusakan dan pembakaran terhadap sebuah rumah makan milik warga Tionghoa di Desa Mulyasari, kemudian berlanjut ke Pamanukan, dengan sasaran rumah dan pertokoan. Dampak peristiwa kerusuhan sosial fisik adalah perusakan dan pembakaran disertai penjarahan terhadap rumah dan toko-toko milik WNI Tionghoa. Sepanjang kurang lebih 1 km mulai dari arah Selatan; Markonis–Islamic Center dan ke Barat sampai rumah makan Permata Hijau–Hotel Pangramo, pertokoan milik WNI Tionghoa tersebut habis dibakar dan dijarah massa. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan sosial tersebut, namun secara psikologis, kerusuhan sosial yang terjadi menimbulkan trauma yang cukup mendalam, khususnya bagi WNI Tionghoa.

Selain konflik sosial bernuansa RAS, di Pamanukan juga pernah terjadi konflik horisontal yang terjadi pada tahun 2002, berupa perkelahian massal antar kampung, yaitu antara warga kampung Bojong Curug dengan warga kampung Pamugan Desa Mulyasari. Kerusuhan dipicu oleh saling rebutan pekerjaan menurunkan batu untuk proyek pembuatan Dam, menjelang persiapan kegiatan agustusan. Dampak konflik horizontal tersebut telah mengakibatkan sejumlah rumah mengalami kerusakan cukup berat karena dibakar massa. Secara sosial-psikologis, hubungan baik yang sebelumnya terpelihara antara warga dari kedua kampung tersebut, bagaimanapun telah terganggu. Beberapa warga masyarakat dilaporkan mengalami depresi melihat kerusuhan yang terjadi.

### **4.2. Kondisi Kesenjangan Sosial Saat Ini di Kecamatan Pamanukan**

Kecamatan Pamanukan dengan luas wilayah 174,731 hektar dihuni oleh jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 40.000 jiwa. secara sosial ekonomi, struktur masyarakat di Pamanukan mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, dan lainnya pegawai, wirausaha serta pertukangan, sedangkan angka

pengangguran menunjukkan jumlah yang cukup besar, yaitu sekitar 30% dari jumlah penduduk Kecamatan Pamanukan.

Berkaitan dengan kondisi keserasian sosial pada saat dilakukan penelitian tahun 2009, seluruh informan sependapat bahwa hubungan sosial di antara golongan atau kelompok masyarakat di Pamanukan saat ini berlangsung cukup harmonis, tidak ada perselisihan atau konflik yang mengarah pada terulangnya kembali peristiwa kerusuhan sosial pada tahun 1997. Dengan demikian, konflik sosial yang terjadi di Pamanukan tidak bersifat ideologis, artinya dalam kehidupan masyarakat tidak adanya ketegangan sosial, karena konflik yang terjadi bersifat insidental dan tidak ada pengulangan.

Upaya penyelesaian konflik yang sudah dilakukan yaitu pemerintah bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak melakukan dialog dan musyawarah. Lembaga seperti Bakom PKB diupayakan berfungsi secara optimal untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi kedamaian kehidupan bermasyarakat di Pamanukan. Disisi lain di kalangan WNI Tionghoa itu sendiri telah terbentuk Paguyuban Masyarakat Tionghoa. Selain itu, tahun 2002 masyarakat di Pamanukan melalui tokoh-tokoh masyarakat formal, tokoh informal, tokoh agama, dan tokoh pemuda, berhasil membentuk paguyuban "*Pamanukan Tersenyum*" (Panter), yang mencakup 13 desa di Kecamatan Pamanukan. Panter tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi gejala-gejala sosial yang muncul di masyarakat yang dapat memicu terjadinya konflik sosial. Namun demikian, pada saat dilakukan penelitian, baik lembaga Bakom PKB maupun "Panter" aktivitasnya sudah meredup bahkan dapat dikatakan tidak aktif lagi.

### **4.3. Gambaran Konflik Sosial di Kabupaten Sambas**

Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Sambas merupakan konflik etnis, yaitu antara warga suku Madura dengan warga suku Melayu

Sambas. Konflik berawal dari tragedi Parit Setia Kecamatan Jawai dua hari sebelum hari raya Iedul Fitri yang jatuh pada tanggal 19 Januari 1999. Tragedi ini bermula dari peristiwa kriminal murni yang kemudian berkembang menjadi konflik etnis yang menjaral ke wilayah lain di Kabupaten Sambas. Sejak bulan Maret 1999 pertikaian antar kelompok dalam masyarakat di Kabupaten Sambas yang semula hanya meliputi Kecamatan Tebas, Pemangkat, Selakau dan Kecamatan Jawai, semakin meluas ke Kecamatan Samalantan, Tujuh Belas, Sungai Raya, Sanggau Ledo, Teluk Keramat, dan Kecamatan Tebas, sehingga gaung kerusuhan sosial tersebut menjadi kerusuhan sosial di Kalimantan Barat.

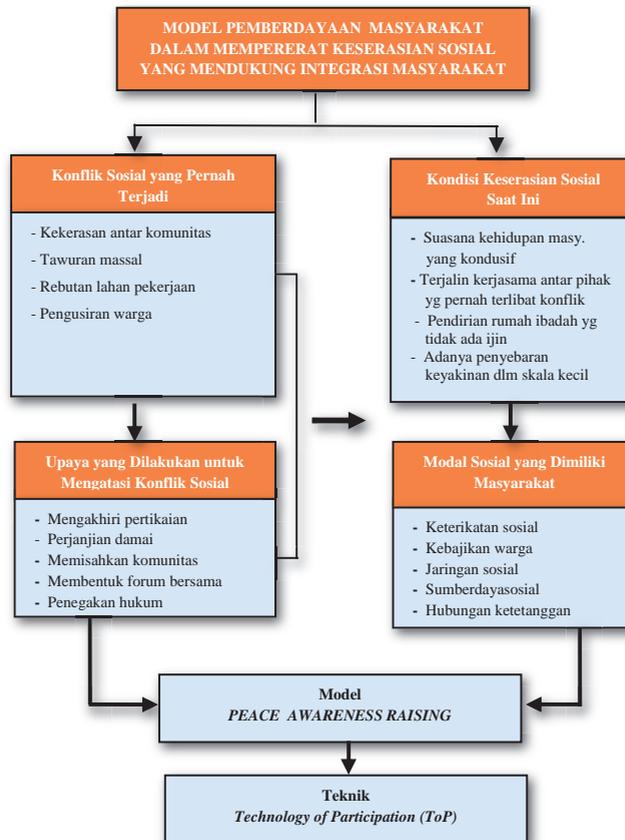
Secara kumulatif sebagai akibat dari pertikaian antar kelompok dalam masyarakat di Kabupaten Sambas, maka sampai bulan Maret 1999 tercatat korban meninggal dunia berjumlah 176, terdiri atas 151 orang suku Madura, 12 orang suku Melayu, 1 orang suku Dayak, dan 12 orang belum diketahui identitasnya. Kemudian luka luka (berat/ringan) berjumlah 47 orang, yakni ; 17 orang suku Madura, 29 orang suku Melayu, dan 1 orang suku Dayak. Sementara warga suku Madura yang diungsikan berjumlah 34.326 jiwa. Dengan banyaknya korban akibat kerusuhan, dan khususnya terjadinya arus pengungsian dalam jumlah besar, mengakibatkan struktur sosial dalam masyarakat di Kabupaten Sambas mengalami perubahan yang signifikan. Bagi suku Madura, jelas bahwa struktur sosial dalam kehidupan mereka menjadi kacau balau, banyak keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Selain korban jiwa, dampak kerusuhan sosial juga mengakibatkan kerusakan bangunan tempat tinggal pribadi, bangunan pemerintah dan fasilitas umum yang hancur dibakar, serta terganggunya kegiatan usaha.

### **4.4. Kondisi Keserasian Sosial Saat Ini di Kabupaten Sambas**

Kondisi keserasian sosial di Kabupaten Sambas pada saat dilakukan penelitian tahun

2009 tergolong kondusif dalam kehidupan keseharian warga masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dengan berbagai tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun nonformal, terungkap bahwa masyarakat Sambas yang terdiri atas tiga sukubangsa utama yaitu Melayu, Dayak, dan Tionghoa merupakan masyarakat yang tidak

dapat menerima kembali warga suku Madura ke Kabupaten Sambas. Alasan penolakan yang selalu disampaikan adalah mereka merasa trauma atas kejadian kerusuhan tersebut. Para informan menuturkan bahwa dalam kehidupan masyarakat di Sambas tidak pernah tertanam suatu keyakinan bahwa masyarakatnya sebagai yang lebih “kuat” dan oleh karenanya ingin



Gambar 1. Bagan Teknik Technology of Participation (ToP)

mudah untuk terjadinya gangguan keserasian sosial berupa konflik sosial baik yang berasal dari faktor ekonomi maupun keyakinan agama.

Berkaitan dengan hubungan antar etnis yang pernah menimbulkan kerusuhan berupa konflik sosial dengan suku Madura, hingga saat penelitian ini berlangsung, pada prinsipnya pihak warga masyarakat di Kabupaten Sambas baik suku Melayu, Dayak, maupun Tionghoa belum

“menguasai” kehidupan di antara masyarakat di wilayah lainnya. Berkaitan dengan tindak kekerasan antar warga yang pernah terjadi, menurut mereka hal itu bukan atau tidak ada kaitannya dengan sikap masyarakat yang mengarah pada terjadinya konflik. Dengan kata lain, penyebab terjadinya konflik bukan merupakan faktor yang bersifat ideologis dalam kehidupan masyarakat Sambas. Lebih

lanjut para informan berpendapat bahwa faktor pemicu terjadinya konflik semata-mata karena faktor budaya, dan bukan karena hal yang lain.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, ternyata baik suku Melayu, Dayak maupun suku Tionghoa yang berada di luar Sambas, misalnya di Singkawang, mereka dapat menerima kehadiran kembali warga Madura untuk menetap dan hidup secara normal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa hingga sekarang masyarakat di Sambas belum dapat menerima kembali kehadiran warga Madura? Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, kiranya perlu dilakukan penelitian lanjutan.

#### 4.5. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Mempererat Kekerabatan Sosial.

Model pemberdayaan masyarakat dalam mempererat kekerabatan sosial yang mendukung integrasi masyarakat adalah “Model Peningkatan Kesadaran akan Perdamaian” (*Peace Awareness Raising*).

Model ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan nilai-nilai sosial dan modal sosial yang sudah ada. Model *Peace Awareness Raising* ini dilakukan melalui tahapan kegiatan : analisis daerah rawan konflik atau daerah yang pernah mengalami konflik sosial; perencanaan tindak dan pelaksanaan kegiatan.

Teknik terpilih yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat dalam mempererat kekerabatan sosial adalah teknik Teknologi Partisipasi (*Technology of Participation*), yaitu teknik yang dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk dalam kegiatan kekerabatan sosial.

### 5. KESIMPULAN

1. Struktur masyarakat baik di Pamanukan maupun di Sambas sebenarnya *cross cutting*,

yakni ada dominasi dari segi jumlah dari lapisan masyarakat tertentu. Berdasarkan hal ini, struktur masyarakat di Pamanukan dan Sambas tidak kondusif untuk terjadinya konflik. Akan tetapi, pada kenyataannya konflik tetap terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak selamanya struktur masyarakat yang *cross cutting* tidak menimbulkan konflik

2. Konflik sosial yang terjadi di Pamanukan Kabupaten Subang-Jawa Barat dan di Sambas Kalimantan Barat dapat dikategorikan sebagai *welfarist communalism*, yaitu konflik yang terjadi karena kecemburuan sosial akibat distribusi sumberdaya yang tidak seimbang antara penduduk pribumi dengan pendatang, dan kategori *retaliatory communalism*, yakni konflik yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan antar komunitas, dengan sentimen keagamaan sebagai pemicu konflik.
3. Mekanisme kontrol sosial memang dirasakan tidak berfungsi oleh sebagian informan. Meskipun masyarakat Pamanukan maupun Sambas mengklaim sebagai masyarakat agamis, tetapi mekanisme kontrol sosial yang seharusnya mengendalikan perilakuarganya ternyata kurang berfungsi dengan baik.

### 6. REKOMENDASI

1. Pemerintah Kabupaten Subang dan Kabupaten Sambas bekerjasama dengan dinas/instansi terkait serta komponen masyarakat, sedapat mungkin melakukan upaya penguatan kekerabatan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kekerabatan sosial. Penguatan terus menerus terhadap dimensi-dimensi kultural kearifan lokal dan modal sosial, pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam upaya membimbing masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dan tanpa konflik.
2. Sebagai upaya pencegahan terjadinya kembali bencana sosial (konflik sosial), maka

dipandang perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam mempererat keserasian sosial yang mendukung integrasi masyarakat. Model pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dapat menggunakan “Model Peningkatan Kesadaran akan Perdamaian (*Peace Awareness Raising*).”

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo. 2008. *Praktek Pekerjaan Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Kapital Sosial Bagi Penanggulangan Bencana*. Bandung : Puskasi-Lemlit STKS
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Christenson A., James, Jerry W. Robinson Jr, 1989. *Community Development in Perspective*, Iowa State University.
- Colier, Paul, 1998. *Social Capital And Poverty*. Social Capital Initiative Working Paper, The World bank.
- Crawford, Beyerly, 1998. *The Myth of Ethnic Conflict*, University of California at Berkeley.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Fromm, Erich. 2001. *Akar Kekerasan*. Penerjemah : Imam Muttaqin. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fisher, Simon, et.al (2000). *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak* (Alih bahasa : S.N. Kartikasari dkk). Jakarta : The Britis Council
- Ife, Jim. 2002. *Community Development, Community-based alternatives in an age of globalization*. Pearson Education Australia
- Nakagawa, Yuko., Rajib Shaw, 2004. *Social Capital, A Missing Link To Disaster Recovery*. International Journal Of Mass Emergencies and Disasters, UNCRD.
- Zulfan Tadjoeuddin. 2002. *Anatomy of Social Violence In The Context of Transition : The Case of Indonesia*, UNSFIR Working Paper.
- Smith, Claire Q. 2002. *Conflict and Conflict Resolution at the local level*. World Bank